

Sinergitas Kurikulum Madrasah *Diniyah Takmiliyah* dan Madrasah Formal di Pesantren

Samsul Arifin¹, Syuhud²

^{1,2}Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia;
1syaif18@gmail.com, 2syuhudlu@gmail.com

Abstract :

Purpose – The fact that madrasah diniyah is a part of the network of Islamic educational institutions in Indonesia is thought to be detrimental to the institution's continued survival. Madrasah Diniyah, a school that emphasizes social functions to society so that they can continue to live and be civilized, is motivated by this challenge.

Design/methodology/approach - This study is a sort of case study that employs a qualitative methodology. which emphasizes how Islamic boarding schools' curricula should be integrated into a complete curriculum synergy and uses research methods like interviews, observation, and documentation using valid cumulative data.

Research limitations/implications – Combining a thorough curricular synergy with grass-roots theory to make it more adaptable for future madrasah.

Findings/ Originality/Value – The Syarifuddin Islamic Boarding School's official curricula and madrasah diniyah were developed in concert. finished with the grass-roots approach. The only difference between the growth model and the one created by Beuchamp is that the latter does not employ the arena model..

Keywords ; *Curriculum Synergy; Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pesantren Education.*

Paper type – Field Research

KITABACA:

Journal of Islamic Studies
Vol 1 No 1 December 2023

<https://doi.org/10.54471/kitabaca>

Received: 21 Agustus 2022

Accepted: 29 September 2022

Published: 10 Desember 2022

Publisher's Note: International Consortium of Islamic researchers (ICONIR) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC
BY) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introduction

Madrasah diniyah takmiliyah dan madrasah formal, keduanya merupakan hasil perkembangan dari realitas pendidikan di Indonesia. Semula merupakan Madrasah diniyah (madrasah pendidikan agama Islam) didirikan di Indonesia adalah dalam bentuk pesantren. Dengan karakternya yang khas "*religious oriented*", pesantren telah mampu meletakkan dasar-dasar pendidikan keagamaan yang kuat. Para santri tidak hanya dibekali pemahaman tentang ajaran Islam tetapi juga kemampuan untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam (Tharaba, 2020). Kegiatan madrasah diniyah takmiliyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna dari pendidikan formal atau informal (Nasucha, 2019; RZ, 2013).

Keberadaan madrasah diniyah sebagai entitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia banyak menemui tantangan baik eksternal maupun internal. Ini, dinilai berdampak negatif terhadap tergerusnya eksistensi madrasah diniyah sebagai entitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Menariknya, tantangan tersebut memotivasi madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan yang menekankan fungsi sosial kepada masyarakat (Istiyani, 2017).

Keberadaan ini menuntut untuk dari sisi sistem manajemen sekolah perlu ditata kembali, terutama dalam hal kurikulum yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pendidikan Islam (Shohib & Mahsun, 2021). Dengan restrukturisasi kurikulum, diharapkan Madrasah ini akan dibutuhkan oleh masyarakat sepanjang masa, yang pada gilirannya akan berdampak pada luasnya pengembangan syiar Islam (Salahuddin, 2012).

Kurikulum harus memiliki kesesuaian, fungsi integrasi, diferensiasi atau pembeda, bisa berkiprah dan hidup di masyarakat, Santri bisa memilih kurikulum yang disediakan pesantren yang relevan dengan dirinya, diagnostik yakni kurikulum harus bisa mendiagnosa perubahan yang terjadi di masyarakat (Fahlevi, 2020). Literatur tentang dinamika sosial-keagamaan di madrasah telah menemukan rangkaian praktik khusus yang secara kolektif menyarankan interpretasi Islam yang lebih konservatif atau progresif (Mahsun et al., 2022). Karena bidang ini dipelajari dalam kepemimpinan pendidikan di kalangan pesantren sebagai prioritas utama (Brooks et al., 2020). Semakin tinggi orientasi keislaman ini, manajemen pengetahuan dan penerapan strategi, maka kinerja pondok pesantren akan semakin baik (Rofiaty, 2019).

Madrasah formal di pesantren selain berbeda dalam formil ijazah lulusannya juga berbeda dalam hal lainnya. Misalnya dalam hal pendidikannya. Guru pada madrasah diniyah biasanya diambil dari beberapa orang lulusan pesantren dan ahli agama (Akhiruddin, 2015). Hal ini berbeda dengan madrasah formal. Guru pada madrasah formal diseleksi dan diangkat sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum dalam pendidikan formal. Guru bahasa Indonesia contohnya, harus memiliki spesifikasi kurikulum vitan lulusan pendidikan bahasa sehingga proses standarisasi di pendidikan formal lebih 'tertata'. Perbedaan inilah yang secara signifikan membuat differensiasi dualism sistem pendidikan pesantren. Dapat dikatakan bahwa beberapa

lembaga pendidikannya memiliki varian dan orientasi yang terpecah. Hal-hal demikian ini tentu menyebabkan pesantren tidak terfokus dan juga dapat dibidang tidak terorganisir secara sistemik. Sistem yang tidak terorganisir tentu juga susah dalam mencetak santri yang sesuai orientasi pendidikan utamanya (Nizah, 2016; Yusuf, 2019).

Memang secara legal madrasah diakui menjadi pendidikan formal pendidikan di Indonesia. Akan tetapi aturan formalisasi pendidikan pesantren tetap dikhawatirkan kurang menghilangkan orientasi pendidikan ad-diniyahnya. Hal ini sebenarnya berkenaan dengan aturan pemerintah terkait dengan formalisasi dan penyesuaian kurikulum madrasah. Madrasah diniyah yang sejak awal kurikulumnya berorientasi penuh pada pendidikan agama harus dikurangi dengan memasukkan pendidikan ilmu pengetahuan umum (Mustofa, 2020; Nugraha et al., 2021).

Adanya kebijakan pemerintah tidak banyak berpengaruh, banyak pengelola pendidikan yang masih resisten menghadapi hadirnya aturan ini. Sebab begitu sulit dan tidak diterima oleh mayoritas pengelolanya. Baik syarat pengakuan sekolah dari luar negeri hingga syarat minimum peserta didik membuat madrasah diniyah keberatan. Apalagi aturannya masih mewajibkan memasukkan kurikulum umum (Marhumah, 2011).

Disebabkan pendidikan agama yang dikhawatirkan lenyap, banyak pesantren yang tetap ingin menjaga sistem pendidikan indigenitasnya ini. Hal demikian ini tentu menjadikan pesantren memiliki dua sistem lembaga sekaligus. Artinya, pesantren dengan model ini mengadopsi pendidikan formal dan tetap menjalankan pendidikan madrasah diniyahnya. Sehingga tidak heran, dewasa ini, umum dikenal di pesantren ada dua lembaga sekolah yang hampir mirip. Keduanya yakni pendidikan formal yang diadopsi pesantren (madrasah formal) dan pendidikan madrasah diniyah yang coba terus dipertahankan (Anwar & El Fiah, 2018).

Mayoritas santri atau bahkan masyarakat pun berasumsi bahwa madrasah formal yang diadopsi untuk belajar dengan legalitas ijazah formal. Sedangkan madrasah diniyah diasumsikan sebagai proses wajib ke pesantrenan dalam memahami ilmu agama (Haddade, 2021). Dengan kata lain, masyarakat pun membedakan orientasi proses madrasah formal dan diniyah berbeda. Hal ini disebabkan adanya modernisasi pendidikan dianggap telah memecah belah sistem pendidikan pesantren menjadi dua bagian. Yakni, sistem pendidikan nonformal yang tradisional (madrasah diniyah) dan sistem pendidikan formal yang telah diadopsi (madrasah formal).

Untuk mengatasi masalah ini, akhirnya ada beberapa lembaga pendidikan yang mulai menggagas perpaduan dualitas sistem pendidikan yang berbeda tersebut. Salah satu contoh yang ditemui oleh penulis adalah pesantren kyai Syarifuddin Kabupaten Lumajang. Lembaga ini mengupayakan keterpaduan sistem madrasah formal dan madrasah menjadi satu sistem pendidikan terpadu pesantren. KH. Sulahak Syarif mengatakan bahwa Madrasah diniyah merupakan hal yang tidak terpisah dari proses pendidikan pesantren. Sedangkan madrasah formal merupakan reinkarnasi pendidikan

madrasah pesantren agar memenuhi legal formal yang berlaku. Jadi semuanya merupakan kesatuan sistem pendidikan pesantren. Jadi selama ini proses pendidikan pesantren salah kaprah jika membedakan keduanya ini. Muhammad Darwis, kepala sekolah diniyah, menambahkan bahwa keterpaduan madrasah diniyah pada madrasah formal ini menjadi solusi dalam menghadapi masalah yang disebabkan arus globalisasi dan modernisasi dewasa ini.

4. Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok (Rohman & Bachri, 2021; Ulfatin, 2022). Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus. Fokus kasus yang akan sisoroti adalah integrasi pengembangan kurikulumnya. Jadi tujuan penelitian ini akan mengagambarakan secara komprehensi intergrasi pengembangan kurikulum (Fatimah & Rosyidah, 2021).

Adapun terkait dengan metode pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini, menggunakan analisis interaktif yang mengandung empat komponen yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, penarikan dan pengajuan simpulan (Magdalena et al., 2020; Nurfirdaus & Risnawati, 2019).

Selain itu, pada sisi analisisnya ada beberapa teori yang akan dipakai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kontek penelitian. Ada dua fokus kajian yang dikaji dalam penelitian ini yakni pengembangan kurikulum dan tenaga pendidik. Teori yang akan digunakan dalam mengkaji dua fokus ada adalah *curriculum development theory* dan *human resources theory* (Ulfatin, 2022).

2. Results dan Discussion

Sinergitas pengembangan kurikulum madrasah diniyah pada madrasah formal dilakukan adalah adengan mamasukkan konstruksi kurikulum kedinyahannya menjadi satu kesatua sistem yang dapat dilakasakan secara terpadu. Untuk memahami menajamen kurikulum terpadu formal diniyah di pesantren Syarifuddin Lumajang, terlebih dahulu harus memahami model-model telah disusun oleh beberapa pakar tentang manajemen pengembangan kurikulum. Sebagaima dipahami bersama, bahwa ada beberapa model kurikulum yang dikembangkan oleh para pakar, yakni diantaranya, *administrasion model* (Dakir, 2019), *Tyler model* (Juliana et al., 2016), *the grass roots model* (Arifin, 2012), *Beauchamp's system* (Alonso-Alonso et al., 2015), *Taba's inverted model* (Rosnaeni et al., 2022) dan lain sebagainya.

Berdasarkan sumber yang telah diwawancarai ada beberapa langkah pengupayaan perumusan kurikulum yang tersinergi kurikulum diniyah pada pendidikan formal. Adapun yang demikian ini, yakni pertama, Membentuk tim perumusan perpaduan kurikulum diniyah pada sekolah formal. Menurut penuturan KH Sulahak, orang yang menjadi perumus tim adalah beberapa pengelola madrasah formal dan diniyah pesantren. Dari madrasah formal yang diikutikan adalah waka kurikulum dan waka kesiswaan sedangkan bagi madrasah diniyah adalah seluruh asatid yang biasa menyusun mengurus kurikulumnya juga.

Selain itu, beberapa pihak yang ikut serta dalam penyusunan kurikulum juga dari beberapa keluarga kyai yang menjadi pengurus Yayasan di pesantren. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Darwis yang mengatakan bahwa pihak Yayasan yang berasal dari keluarga pengasuh pesantren juga ikut serta sebagai pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab pada proses pendidikan pesantren.

Pada langkah pertama ini sebenarnya pengintegrasikan kurikulum dilakukan melalui model pengembangan top down. Artinya, pada satu sisi kurikulum diintegrasikan didasarkan pada perumusan yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang di struktur pengeloaah pendidikan pesantren. Yang demikian ini sebenarnya tidak terlepas dari struktur budaya pendidikan pesantren yang bersifat sentralitas.

Akan tetapi, jika dipandang lebih luas, walaupun pihak Yayasan memiliki wewenang tertinggi, keikutsertaan beberapa asatid di dalamnya juga mengindikasikan bahwa integrasi penyusunan kurikulum yang dilakukan tidak secara sentralistis. Dengan ikut sertanya dua pengembang kurikulum dari madrasah formal dan diniyah, megindikasikan prosesnya juga dilakukan dengan model pembangan *grass root*. Sebagaimana dipahami bersama bahwa model pengembang *grass root* merupakan model pengemabangan kurikulum berdasarkan inisiatif dari bawah, kebalikan dari model administrasi (Arifin, 2012). Artinya, dengan model pengembangan ini, penghintegrasian kurikulum disusun juga didasarkan pada aspirasi struktur bawah pengelolah. Ikut sertanya beberapa asatid merupakan hal upayan desentralisasi penyusunan agar secara komprahensif integrasi kurikulum diniyah pada madrasah formal tidak mennghilangkan subsatnsi orientasikan pendidikan kedua lembaga ini. Hal di atas ini sebagaimana yang dituturkan oleh Darwis,

Proses penyusunan kurikulum sebenarnya juga tidak secara mutlak sentralistis. Tidak sepenuhnya dalam penyusunannya dipasrahkan pada pihak tertinggi struktur. Waka kurikulum madrasah formal dan beberapa asatid yang tentunya sebelumnya mereka sudah mengumpulkan gagasan dasar penyunan melalui musywarah internal di lembaga masing-masing juga ikut serta menyusun kurikulum bersama. Pihak yayasan membukan ruang bagi mereka

untuk merumuskan bersama integrasi kurikulum yang akan mereka pakai (Wawancara Muhammad Darwis).

Adapun terkait dengan hasil penyusunan yang dilakukan pada tahap pertama adalah dirumuskannya orientasi capaian integrasi kurikulum yang akan dilakukan. Pada aspek orientasinya, integrasi kurikulum diharapkan dapat membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian yang terpadu pula (*integrated personality*). Artinya, penguatan keagamaan yang selama ini dirasa lemah dapat menyempurnakan kemampuan peserta didik menjadi lebih baik. Pada aspek orientasi juga diharapkan dapat meniadakan dikotomi orientasi pendidikan formal dan diniyah. Disamping itu, dengan tidak adanya dikotomi ini diharapkan meningkatkan animo masyarakat pada pendidikan madrasah diniyah agar setara dengan pendidikan formal.

Setelah selesai dirumuskannya orientasi kurikulumnya, langkah selanjutnya adalah langkah kedua, yakni beberapa tim penyusun merumuskan hal yang harus disiapkan dalam tahap selanjutnya. Pada aspek ini disebut dengan perencanaan. Prosesnya dilakukan oleh tim yang terdiri dari beberapa pihak yakni pengelola madrasah diniyah dan pengeloh madrasah formal.

Ketiga, tahap implemementasi. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah pengorganisian dan langkah pelaksanaannya. Pada pengorganisasiannya, yang pertama dilakukan adalah dengan mengintegrasikan mata pelajaran dan jadwal diniyah pada pelajaran dan madrasah formal. Menurut Wadud Nafis, beberapa mata pelajaran seperti *ushul fiqh*, *balaghah*, ilmu *hadist*, *aqidatul awam* dan ilmu tafsir di madrasah diniyah dijadikan sebagai penguat pelajaran agama yang ada di madrasah formal.

Selain masalah mata pelajaran, pengorganisian juga dilakukan pada pendidik yang akan bertanggung pada pengajaran mata pelajaran yang sudah disusun. Pada aspek ini, pendidik madrasah diniyah agar dibentuk menjadi satu kesatu kerja dan proses pendidikan. Artinya, pendidik madrasah formal ikut serta dalam penguatan pendidikan kediniyahan, begitupun sebaliknya pada pendidik madrasah diniyah.

Sedangkan pada langkah pelaksanaannya, integrasi kurikulumnya dijadikan dua varian pembelajaran. Pembelajaran kedinayahan diadakan saat pagi, sedangkan pembelajaran formal diadakan setelahnya. Selain itu, integrasi pelaksanaannya ini dilakukan melalui pengintegrasian administrasi pembelajaran siswa. Misalnya seperti absensi kehadiran yang disatukan menjadi satu administrasi terpadu.

Keempat, tahap evaluasi. Pada aspek penilainya pun, disusun dengan terintegrasi juga. Penilaian pada proses pembelajaran diniyahnya disusun dengan terpadu. Maksudnya, nilai proses pembelajaran diniyah peserta didik berpengaruh atau berhubungan pada penilaian proses pembelajaran formal

yang ditempuh. Integrasi evaluasi pelaksanaan kurikulum pada tahap ini. Kyai Sulahak mengatakan,

Proses itu diharapkan dapat membuat tercapai orientasi ketiga dari diadakan upaya integrasi diniyah dan formal di pesantrennya. Adapun orientasi tersebut adalah penguatan eksistensi pembelajaran diniyah dalam proses pendidikan santri di pesantren. Pembelajaran diniyah selama ini dinomerduakan karenan ijazahnya tidak dapat diakui di dunia kerja. Dengan dipadukan tentu akan membuat pembelajaran juga menjadi penting untuk ditempuh.

Berdasarkan temua di atas, integrasi kurikulum madrasah diniyah pada madrasah formal dapat dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum grass root. Dianggap memakai model grass root, sebab penyusunannya didasarkan pada kereatifitas pengelola dua lembaga yang diintegrasikan. Model pengembangan yang dilakukan hampir senada dengan model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Beauchamp. Namun, perbedaannya terletak pada model penyusunannya yang tidak diawali dengan penentuan arena pengembangannya.

3. Conclusion

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa konklusi penting dalam penelitian ini. Pertama, konklusi tentang integrasi pengembangan kurikulum madrasah terpadu Pesantren Syarifuddin. Dilakukan dengan menggunakan *model grass root*. Model pengembangannya hampir sedana dengan model yang dikembangkan *Beuchamp*, hanya saja tidak memakai model arena. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah Membentuk tim perumus Integrasi Kurikulum, Menyusun Perencanaan Pelaksanaan Intergrasi Kurikulum, Tahap Pelaksanaan Intergrasi Kurikulum, Tahap evaluasi Intergrasi Kurikulum.

4. Reference

- Akhiruddin, K. M. (2015). Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 195–219.
- Alonso-Alonso, M., Woods, S. C., Pelchat, M., Grigson, P. S., Stice, E., Farooqi, S., Khoo, C. S., Mattes, R. D., & Beauchamp, G. K. (2015). Food reward system: current perspectives and future research needs. *Nutrition Reviews*, 73(5), 296–307.
- Anwar, S., & El Fiah, R. (2018). Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 435–454.
- Arifin, Z. (2012). *Konsep dan model pengembangan kurikulum: konsep, teori, prinsip*,

prosedur, komponen, pendekatan, model, evaluasi dan inovasi.

- Brooks, M. C., Brooks, J. S., Mutohar, A., & Taufiq, I. (2020). Principals as socio-religious curators: progressive and conservative approaches in Islamic schools. *Journal of Educational Administration*, 58(6), 677–695. <https://doi.org/10.1108/JEA-01-2020-0004>
- Dakir, H. (2019). *Perencanaan dan pengembangan kurikulum*.
- Fahlevi, F. (2020). *Kemenag Lakukan Pemetaan Model Kurikulum Pesantren*. Tribunnnews.Com.
- Fatimah, S., & Rosyidah, I. (2021). Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidik di MTs SA Miftahul Hikmah Parengan Tuban. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 3(1), 66–75.
- Haddade, H. (2021). *Strategi Pemberdayaan Madrasah Berbasis Masyarakat*.
- Istiyani, D. (2017). Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika*, 127–145.
- Juliana, K., Amin, M., & Suarsini, E. (2016). Pengembangan buku ajar matakuliah biologi sel dengan pendekatan bioinformatika untuk mahasiswa s1 pendidikan biologi universitas negeri malang. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(9), 1677–1683.
- Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A. (2020). Analisis bahan ajar. *Nusantara*, 2(2), 311–326.
- Mahsun, M., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāsid al-Syar'ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Masalahah. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 126–148.
- Marhumah, E. (2011). *Konstruksi sosial gender di pesantren; Studi kuasa kiai atas wacana perempuan*. Lkis Pelangi Aksara.
- Mustofa, I. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan). *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 20–35.
- Nasucha, J. A. (2019). *Pendidikan Islam Formal, Informal dan Non Formal*.
- Nizah, N. (2016). *Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis*.

Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 11(1).

- Nugraha, M. T., Pandi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 36-43.
- Nurfirdaus, N., & Risnawati, R. (2019). Studi tentang pembentukan kebiasaan dan perilaku sosial siswa (Studi Kasus di SDN 1 Windujanten). *Jurnal Lensa Pendas*, 4(1), 36-46.
- Rofiaty, R. (2019). The relational model of entrepreneurship and knowledge management toward innovation, strategy implementation and improving Islamic boarding school performance. *Journal of Modelling in Management*, 14(3), 662-685. <https://doi.org/10.1108/JM2-05-2018-0068>
- Rohman, N., & Bachri, B. S. (2021). Analisis Teori Behaviorisme (Thorndike) Pada Pelajaran Matematika Dan Bahasa Indonesia Sdn Upt Xvii Mukti Jaya Aceh Singkil. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 4(2), 46-62.
- Rosnaeni, R., Sukiman, S., Muzayanati, A., & Pratiwi, Y. (2022). Model-Model Pengembangan Kurikulum di Sekolah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 467-473.
- RZ, A. (2013). *Pentingnya Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)*. Nu.or.Id.
- Salahuddin, M. (2012). Pengembangan kurikulum madrasah diniyah takmiliyah. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 10(1), 45-58.
- Shohib, M., & Mahsun, M. (2021). Konkretisasi Kultur Pesantren Madura Dalam Pembentukan Karakter Religius Era Disrupsi. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 18(1), 1-13.
- Tharaba, M. F. (2020). Pesantren dan madrasah dalam lintasan politik pendidikan di Indonesia. *Managere (Indonesian Juornal of Education Management)*, 2(2), 136-146.
- Ulfatin, N. (2022). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yusuf, M. (2019). Perkembangan Madrasah Formal Di Indonesia. *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 135-146.